

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Tahap Penelitian	27
4. Teknik Pengumpul Data	28
5. Alat Penumpul Data	30
6. Analisis Data	31

7. Lokasi Penelitian	31
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	32
A. Tinjauan Umum Keuangan Negara	32
1. Pengertian Keuangan Negara	32
2. Dasar Hukum Keuangan Negara	37
3. Ruang Lingkup Keuangan Negara	41
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	43
1. Pengertian Pengawasan	43
2. Macam-macam Pengawasan	47
C. Pengaturan dan Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara	50
1. Pengaturan Pengawasan Keuangan Negara	50
2. Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara	51
D. Tinjauan Korupsi Pada Umumnya	55
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	55
2. Penyelenggaraan Negara	56
3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	58
E. Tinjauan Korupsi Pada Umumnya	60

BAB III PERANAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI	65
A. Gambaran Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	65
1. Sejarah Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	65
2. Visi Misi dan Nilai-Nilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	68
3. Status, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	70
4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	74
5. Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	76
B. Mekanisme Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah	77
C. Hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)	79
D. Kasus Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah	83

BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014	89
	A. Kewenangan dan Fungsi Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	89
	B. Hambatan Dan Upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Melaksanakan Kewenangan dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	101
BAB V	PENUTUP	114
	A. Simpulan	114
	B. Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118